



# *Nota Penjelasan* **LKPJ 2019**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019  
KEPADA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR**





## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **NOTA PENJELASAN GUBERNUR MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,*

**Yang Kami Mulyakan,**

Pimpinan dan Para Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur;  
Segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;

**Yang Kami Hormati,**

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Para Kepala Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan

Hadirin Para Undangan, Wakil dari Institusi/Lembaga/Organisasi di Provinsi Jawa Timur.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, puji syukur kita persembahkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna **PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR** sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Semoga laporan pertanggungjawaban tahun 2019 yang kami sampaikan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari ALLAH Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dapat memenuhi harapan seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat.

Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, baik atas nama pribadi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi, pertama kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, yang pada hari ini telah mengagendakan sidang paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 dan telah dihadiri oleh 2/3 lebih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga sidang paripurna mencapai jumlah quorum sekaligus memenuhi ketentuan tata tertib persidangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kedua ucapan terima kasih dan apreasi kami sampaikan kepada Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Provinsi Jawa Timur dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Para Pimpinan Instansi Lintas Sektor dan Instansi Vertikal di Jawa Timur yang telah memberikan dukungan kelancaran dalam persiapan penyusunan seluruh materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 sehingga dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan serta dapat disampaikan tepat waktu kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

Ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak baik Swasta, Dunia Usaha, Lembaga Swadya Masyarakat, Lembaga Sosial Kemasyarakatan maupun Perguruan Tinggi yang telah membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan penugasan yang kami laksanakan di Jawa Timur tahun 2019 sehingga memberikan kontribusi capaian kinerja yang lebih dari tahun sebelumnya.

***PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI,***

Perlu kami informasikan bahwa landasan hukum secara umum dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 69 ayat (2), yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Ketentuan peraturan perundangan mengenai penyampaian kewajiban pelaporan Kepala Daerah tersebut secara operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan format dan sistematika mengacu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/Otda tentang Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dapat kami jelaskan bahwa substansi materi yang dilaporkan kepada DPRD adalah pertanggungjawaban terhadap implementasi dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Kami sampaikan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, bahwa RKPD Tahun 2019 adalah dokumen transisi, RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran implementasi tahun terakhir dokumen RPJMD Tahun 2014-2019. Sementara disisi lain, dokumen RKPD Tahun 2019 juga merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Manifestasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 tersebut telah didukung dengan alokasi APBD Provinsi Jawa Timur untuk seluruh program-program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Jawa Timur Nomor 188/10/NK/013/2018 dan Nomor 160/10/NK/060/2018 Tanggal 24 September 2018 tentang Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 serta Nota Kesepakatan Bersama Nomor 188/8/NK/013/2019 dan Nomor 188/8/NK/050/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Perubahan KUA APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

Adapun legalitas penganggaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 serta perubahan anggaran melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

Arah kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan agar terlihat lebih fokus dan bisa menjadi acuan semua perangkat daerah provinsi maka dalam dokumen RKPD Tahun 2019 ditetapkan Tema yaitu *“Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”*. Tema tersebut telah disinkronkan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan tujuan agar hasil pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja pembangunan secara Nasional.

**HADIRIN, PESERTA SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,**

Pengelolaan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur. Kebijakan pengelolaan keuangan serta proyeksi atau target anggaran diarahkan untuk mendukung capaian prioritas pembangunan sebagaimana

tertuang dalam RKPD 2019. Berikut kami jelaskan secara singkat pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Tahun 2019.

Total APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berasal dari **Pos Penerimaan** sebesar **33,45 Trilyun Rupiah lebih** dari target yang ditetapkan sebesar **33,42 Trilyun Rupiah lebih** atau **mencapai 100,08** persen. Total anggaran ini diperoleh dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pos Dana Perimbangan serta Pos Penerimaan dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

#### **I. Dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target penerimaan PAD Tahun 2019 sebesar 18,21 Trilyun Rupiah lebih, realisasi mencapai sebesar 19,32 Trilyun Rupiah lebih atau mencapai 106,12 persen. Penerimaan ini diperoleh dari Pajak Daerah sebesar 15,52 Trilyun Rupiah lebih, Retribusi Daerah sebesar 146,81 Milyar Rupiah lebih, kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 402,29 Milyar Rupiah lebih serta dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 3,25 Trilyun Rupiah lebih.

#### **II. Dari Pos Dana Perimbangan**

Target penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 sebesar 14,97 Trilyun Rupiah lebih, realisasi mencapai sebesar 13,94 Trilyun Rupiah lebih atau 93,10 persen. Penerimaan ini diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 2,39 Trilyun lebih, kemudian dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,99 Trilyun lebih serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 7,55 Trilyun Rupiah lebih.

### III. Dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target penerimaan dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar 239,62 Milyar Rupiah lebih, realisasinya mencapai sebesar 186,39 Milyar Rupiah lebih atau 77,79 persen. Penerimaan ini diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar 112,1 Milyar Rupiah lebih, dan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 73,8 Milyar Rupiah lebih.

Kekuatan dana APBD Tahun Anggaran 2019 tersebut secara keseluruhan dialokasikan untuk **Pos Belanja Daerah** dengan target sebesar **38,00 Trilyun Rupiah lebih**, terealisasi sebesar **34,00 Trilyun Rupiah lebih atau 89,48 persen**.

Dari total Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk **Belanja Tidak Langsung** dengan target sebesar **26,06 Trilyun Rupiah lebih** dan realisasinya mencapai sebesar **23,62 Trilyun Rupiah lebih** atau 90,66 persen. Kemudian dialokasikan untuk **Belanja Langsung** dengan target sebesar **11,94 Trilyun Rupiah lebih**, realisasinya mencapai sebesar **10,37 Trilyun Rupiah lebih atau 86,90 persen**.

Sedangkan dari sisi **Penerimaan Pembiayaan Daerah** Tahun 2019 dialokasikan sebesar **4,95 Trilyun Rupiah lebih**, terealisasi sebesar **4,95 Trilyun Rupiah lebih atau mencapai 100 persen**. Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sementara itu, alokasi **pos Pengeluaran Pembiayaan** ditargetkan sebesar 378,8 Milyar Rupiah dengan realisasi sebesar 74,6 Milyar Rupiah atau sebesar 19,7 persen. Pengeluaran Pembiayaan

dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

***PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI,***

Dalam sidang paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 ini secara keseluruhan kami sampaikan dalam bentuk 2 (dua) Buku, yaitu:

Buku 1 (satu), merupakan Nota Penjelasan Gubernur yang memuat ringkasan laporan mengenai capaian kinerja dari 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun pertama penjabaran pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta ringkasan berbagai bidang Penghargaan Nasional yang diterima Gubernur Jawa Timur Tahun 2019.

Buku 2 (dua), memuat substansi materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2019 yang merepresentasikan capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, Tugas Pembantuan serta Penugasan Tahun 2019.

Kedua buku laporan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan rangkaian laporan yang tidak terpisahkan, karena seluruh materi pertanggungjawaban yang tertuang dalam bab per bab menggambarkan keterkaitan antara kondisi umum daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.

Khusus untuk Buku 2 (dua), ruang lingkup materi laporan keterangan pertanggungjawaban secara umum disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan format dan sistematika pelaporannya disusun dengan mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 Perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Sidang Dewan Yang Terhormat, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan tata tertib persidangan, sebelum pelaksanaan sidang paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Tahun 2019 ini diselenggarakan, kami telah menyampaikan bahan materi persidangan berupa 2 (dua) buku kepada Seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat sebagai bahan pegangan dalam rapat paripurna pada hari ini, melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Maret 2020 Nomor: 131/4530/011.2/2020 tentang Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

***SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,***

Mengawali laporan pertanggungjawaban atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, sebagai pengantar ijinkan kami membacakan Nota Penjelasan yang substansinya kami uraikan ke dalam 2 (dua) Bagian yaitu:

**BAGIAN PERTAMA**, mengenai penjelasan realisasi capaian kinerja 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2019, meliputi IKU **Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Theil, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks**

**Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Risiko Bencana (IRB).**

**BAGIAN KEDUA**, mengenai berbagai bidang penghargaan skala Nasional yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019.

Kedua bagian tersebut secara garis besar kami sampaikan sebagai berikut:

**BAGIAN PERTAMA, mengenai Realisasi Capaian Kinerja 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).**

#### **1. IKU Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 mencapai **2.352,42 Trilyun Rupiah**, meningkat dibanding Tahun 2018 sebesar **2.189,78 Triliun Rupiah**. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2019 mencapai sebesar **1.650,14 triliun**, meningkat dibanding Tahun 2018 sebesar **1.563,76 triliun**.

Peningkatan PDRB ADHK dibanding tahun sebelumnya tersebut menggambarkan nilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,52 persen, meningkat dibanding Tahun 2018 sebesar 5,50 persen, bahkan tumbuh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,02 persen.

Sementara itu, capaian PDRB per kapita tahun 2019 juga meningkat sebesar 6,89 persen, yaitu dari 55,43 Juta (tahun 2018)

menjadi 59,25 Juta (tahun 2019). Artinya secara rerata, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur juga mengalami peningkatan.

Dilihat dari struktur perekonomian, kontribusi sektor tersier PDRB Jawa Timur semakin meningkat menggeser peran kelompok sektor primer (terutama Pertanian), yang sepanjang Tahun 2019 diwarnai musim kemarau panjang, kegagalan panen dan serangan hama penyakit serta musibah bencana alam banjir dan tanah longsor. Kemudian, tiga sektor/kategori yang mendominasi perekonomian Jawa Timur adalah kategori lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi sebesar 30,24 persen terhadap total PDRB Jawa Timur, yang diikuti Perdagangan sebesar 18,64 persen dan Pertanian sebesar 11,43 persen.

Kinerja perekonomian yang membaik tersebut juga diiringi kinerja inflasi Tahun 2019 yang cukup terkendali. Laju Inflasi tahun kalender sampai dengan Bulan Desember 2019 mencapai 2,12 persen, lebih rendah dibanding Inflasi tahun kalender bulan Desember 2018 sebesar 2,86 persen. Inflasi Jawa Timur tersebut adalah terendah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa, dan juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 2,72 persen. Inflasi tahun kalender 2019 juga lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yang mematok inflasi sebesar 3 plus minus 1 persen. Diharapkan dengan inflasi rendah, maka daya beli masyarakat akan semakin meningkat, Inflasi yang terkendali pada level yang rendah dan stabil tersebut memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik Jawa Timur.

## ***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,***

### **2. IKU Indeks Theil**

Indeks Theil merupakan salah satu model yang representatif untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu guna mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota, yang dapat mencerminkan kondisi belum/berkembangnya suatu daerah, kemudian tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, serta tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan kondisi permasalahan tersebut dan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indeks Theil sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama baru yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur, capaian Indeks Theil tahun 2018 (kondisi awal) sebesar 0,4753 sedangkan untuk capaian tahun 2019 masih menunggu hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur.

Mengingat Indeks Theil merupakan IKU baru, dan agar kita memiliki pemahaman yang sama, maka dapat kami sampaikan bahwa Indeks Theil digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah.

Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil, menunjukkan ketimpangan antar wilayah semakin rendah pula.

Berkaitan dengan perkembangan Indeks Theil di Jawa Timur beberapa hal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah, diantaranya: **Pertama**, Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat; **Kedua**, Konsolidasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), adalah bagian dari design sinkronisasi perencanaan pembangunan di Jawa Timur sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir; dan **Ketiga**, membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih cepat dan efisien.

### 3. IKU Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur per September 2019 sebesar 10,20 persen, menurun sebesar 0,65 persen point dibanding September 2018 sebesar 10,85 persen. Secara absolut jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada September 2019 sebesar 4.056.000 jiwa, menurun sebesar 236,15 ribu jiwa dibanding September 2018 sebesar 4.292.150 jiwa. Yang membanggakan kita bersama, penurunan penduduk miskin tahun 2019 adalah terbesar sejak tahun 2013, serta memberikan kontribusi sebesar 26,57 persen terhadap penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional.

Jika dilihat menurut daerah, Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,84 persen turun

menjadi 6,77 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 14,43 persen turun menjadi 14,16 persen pada September 2019.

Selama periode Maret-September 2019 jumlah penduduk miskin Jawa Timur juga mengalami penurunan sebanyak 56.250 jiwa, yaitu dari 4.112.250 jiwa pada Maret 2019 menjadi 4.056.000 jiwa pada September 2019. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 11.120 jiwa, yaitu dari 1.449.270 jiwa pada Maret 2019 menjadi 1.438.150 jiwa pada September 2019. Sementara itu, di daerah pedesaan penduduk miskin turun sebanyak 45.130 jiwa yaitu dari 2.662.980 jiwa pada Maret 2019 menjadi 2.617.850 jiwa pada September 2019.

Penurunan ini tentu tidak terlepas dari upaya keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam kerangka Program Jatim Satya (Jatim Sejahtera dan Mulia) yang meliputi program bantuan sosial terpadu (seperti PKH Plus), pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi produktif (Program APP, Kelompok Usaha Bersama/KUBE, Bantuan Untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi/WRSE), Pemberdayaan UMKM, serta Program Pro Poor lainnya (seperti Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Kemudian, Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T, yaitu Tertinggal, Terluar, Terdalam.

Selanjutnya melalui Pendekatan Inklusif, yaitu mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS sangat penting untuk meningkatkan

efektivitas pengentasan kemiskinan secara inklusif. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Timur.

#### **4. IKU Indeks Gini**

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada September 2019, capaian Indeks Gini di Jawa Timur sebesar 0,364 menurun sebesar 0,007 point dibanding tahun 2018 sebesar 0,371, dan merupakan capaian terendah dalam kurun waktu enam tahun (2013-2018). Sedang dibanding Maret 2019 menurun sebesar 0,006 point yaitu sebesar 0,370, artinya ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk di Jawa Timur berada pada katagori ketimpangan sedang. Jika dilihat menurut daerah, Indeks Gini daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 0,374 atau turun 0,005 point dibanding Maret 2019 sebesar 0,379. Sedangkan Indeks Gini daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 0,314 atau turun 0,004 point dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,318. Capaian Indeks Gini tahun 2019 juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 0,380.

Penurunan ini merupakan representasi kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas pemerataan pendapatan, yaitu dengan melaksanakan prioritas program pembangunan dan fokus ke arah peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Disisi lain, kualitas sumber daya manusia juga terus

ditingkatkan guna memperkuat tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur dan prasarana pelayanan dasar guna meningkatkan konektivitas antar daerah. Tentunya hal tersebut akan melibatkan seluruh stakeholder, utamanya peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah.

## **5. IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan manusia yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Tujuan IPG adalah untuk memberikan informasi mengenai pembangunan yang sudah menggunakan konsep gender dengan pencapaian kualitas hidup penduduk yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu Tahun 2017-2019, yaitu 90,76 (tahun 2017); 90,77 (tahun 2018) dan 90,91 (tahun 2019).

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesetaraan gender. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan, Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan.

**PESERTA SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,  
BERIKUTNYA INDIKATOR KE :**

**6. IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan indeks komposit atau gabungan yang dibentuk oleh tiga variabel dasar, yaitu Indeks Kesehatan yang direpresentasikan dengan umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH); Selanjutnya Indeks Pendidikan, yang diukur melalui Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta Indeks Standar Hidup Layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 70,27 (tahun 2017); 70,77 (tahun 2018), dan terus meningkat mencapai 71,50 pada tahun 2019. Yang membanggakan, capaian tahun 2019 tumbuh sebesar 1,03 persen, tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan pada tujuh tahun terakhir (2013-2019) sebesar 0,99 persen. Peningkatan capaian IPM 2019 disebabkan oleh peningkatan semua komponen pembentuk Indeks.

Peningkatan indeks pembangunan manusia ini mencerminkan semakin membaiknya kualitas pembangunan masyarakat Jawa Timur. Walau demikian, Pemerintah Jawa Timur tetap berupaya keras dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Wilayah dengan katagori IPM “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”.

Selanjutnya berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan kontribusi pada ketiga dimensi IPM tersebut masing-masing kami sampaikan sebagai berikut:

**Pertama**, dimensi Pendidikan yang dibentuk oleh dua variable utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua variabel ini terus menunjukkan peningkatan, Angka Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,46 persen, yaitu dari 13,10 pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 13,16 pada tahun 2019, di atas capaian nasional sebesar 12,95. Sedangkan, Angka Rata-rata Lama Sekolah tumbuh sebesar 2,71 persen yaitu dari 7,39 pada tahun 2018, meningkat menjadi 7,59 pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia dari sisi pendidikan juga mengalami peningkatan. Beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pembangunan manusia dari sisi pendidikan, diantaranya adalah melalui Program Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (TIS-TAS) dengan mengganti beban biaya operasional sekolah (SPP) bagi seluruh siswa jenjang pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Selain itu, Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata) dalam hal membiayai Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penguatan BOSDA MADIN, Pendidikan Kesetaraan berbasis Vokasi.

**Kedua**, dimensi Kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Pada tahun 2019, UHH tumbuh sebesar 0,30 persen, yaitu dari 70,97 (tahun 2018) meningkat

menjadi 71,18 (tahun 2019). Beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pembangunan manusia dari sisi kesehatan, yaitu melalui Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas (TANTISTAS) untuk warga kurang mampu, diantaranya melalui Program Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan perdesaan; Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIPU); Bunda dan Anak Impian (BUAIAN); Santri Jawa Timur Sehat dan Berkah (SAJADAH), Memperkuat Rumah Sakit Umum (RSU) dan memperkuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) rujukan di 5 koridor; Rumah Sakit terapung untuk pelayanan kesehatan di daerah kepulauan terdepan serta mendorong ketersediaan ruang laktasi.

**Ketiga**, dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan melalui angka pengeluaran per kapita per tahun. Tahun 2019 pengeluaran per kapita tumbuh sebesar 3,16 persen, yaitu dari 11,38 juta per tahun (tahun 2018) meningkat menjadi 11,74 juta per tahun (tahun 2019), di atas rata-rata nasional sebesar 11,29 juta per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Timur semakin meningkat. Kondisi ini sejalan dengan makro ekonomi yang ditunjukkan dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (output wilayah) dan PDRB per kapita yang juga mengalami kenaikan selama periode tersebut. Di samping itu, harga-harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok cukup terjaga, hal ini bisa dilihat inflasi selama Tahun 2019 cukup terkendali. Stabilitasnya inflasi tersebut semakin menguatkan daya beli masyarakat Jawa Timur, sehingga roda perekonomian berputar cukup dinamis.

Beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pembangunan manusia dari sisi dimensi standar hidup layak, yaitu melalui penataan pasar tradisional dan inklusi UMKM retail modern serta mendorong *communal branding* UMKM dengan menumbuhkembangkan koperasi wanita, petani, nelayan, dan perdagangan antar pulau.

## **7. IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 3,92 persen, mengalami penurunan 0,07 point dibanding TPT Agustus 2018 sebesar 3,99 persen. Dari sisi jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebanyak 199 ribu orang yaitu dari 21,30 juta orang pada Agustus Tahun 2018 meningkat menjadi 21,50 juta orang pada Agustus Tahun 2019. Sedangkan jumlah pengangguran mengalami penurunan, yaitu sebanyak 0,85 juta orang pada Agustus tahun 2018 menjadi 0,84 juta orang pada Agustus Tahun 2019.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 69,45 persen, meningkat 0,08 persen point dibandingkan Agustus 2018 sebesar 69,37 persen. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Tahun 2019 merupakan agregat hasil kinerja dari kegiatan beberapa Perangkat Daerah diantaranya penyediaan informasi lapangan kerja, Peningkatan kemampuan atau skill angkatan kerja di 16 (enam belas) Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah Provinsi dan penyediaan lapangan kerja yang terus didorong melalui kemudahan prosedur investasi di Jawa Timur serta didukung oleh beberapa kinerja program prioritas baru, diantaranya *Millennial Job Center* dan *Dream Team Science Techno Park (STP)*.

## **8. IKU Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel.

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Timur selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan, yaitu dari Tahun 2017 sebesar 71,11; naik menjadi 72,81 pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 73,83 di tahun 2019.

Meningkatnya indeks reformasi birokrasi ini merupakan wujud Pemerintahan Jawa Timur yang semakin efektif, efisien, dan berkinerja tinggi, menuju birokrasi yang bersih dan anti korupsi. Disamping itu adanya dukungan SDM Aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional dan berkarakter sehingga menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

## **9. IKU Indeks Kesalehan Sosial**

Indeks kesalehan sosial merupakan indeks komposit atau gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian

lingkungan. Indeks ini adalah manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial (dimensi kepedulian sosial) dan lingkungan alam (dimensi kepedulian lingkungan).

Seperti juga Indeks Theil, Indeks Kesalehan Sosial merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Timur. Pada tahun 2018 berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur, capaian Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur sebesar 62,52. Sedangkan untuk capaian tahun 2019 masih menunggu hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur.

Berkaitan dengan target Indeks Kesalehan Sosial yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya keras agar capaian Indeks Kesalehan Sosial selalu berada dalam tren positif sehingga masyarakat Jawa Timur dapat menikmati kondisi lingkungan sosial yang semakin aman, nyaman, damai dan sehat secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah akan terus bersinergi dengan berbagai komponen di Jawa Timur untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan indeks kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan yang aman, damai, kondusif, saling tolong menolong dan berkerjasama, serta peduli terhadap lingkungan sosialnya.

## **10. IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen

penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur pada tahun Tahun 2018 mencapai 66,36 point dan pada tahun 2019 menjadi 65,09. Capaian IKLH tersebut didukung oleh beberapa program diantaranya Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; serta Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.

## **11. IKU Indeks Risiko Bencana**

Indeks Risiko Bencana merupakan Indikator Kinerja Utama baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur tahun 2019-2024. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Indeks Risiko Bencana ini bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah sesuai dengan bahaya (*hazard*) dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) yang mungkin bisa terjadi.

Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota di Jawa Timur berstatus rawan bencana *Hidrometeorologi* saat puncak musim hujan pada Desember hingga Januari 2020. Sementara itu, perkembangan capaian Indeks Risiko Bencana Jawa Timur pada Tahun 2017-2019 terus menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing 166 (tahun 2017); 152 (tahun 2018), dan terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 138. Berdasarkan klasifikasi, Indeks Risiko Bencana Jawa Timur menurun dari kategori “tinggi” menuju “sedang”.

Beberapa langkah strategi dan antisipasi yang dilakukan Pemerintah Jawa Timur adalah :

**Pertama**, Melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik yaitu melalui upaya responsif dan fokus pada saat terjadinya bencana, menuju ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana, serta pengelolaan sistem risiko bencana yang ditandai adanya perencanaan, kegiatan, pendanaan, investasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan atau monitoring.

**Kedua**, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu dengan membangun kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

**Ketiga**, Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, diantaranya dengan perencanaan satu master plan pencegahan dan penanggulangan bencana yang andal, efektif, terpadu.

**Keempat**, melalui beberapa program penanggulangan bencana, diantaranya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana; Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana; dan Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Jawa Timur yang ditargetkan pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD tahun 2019 secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan, walaupun masih ada IKU yang capaiannya belum signifikan seperti

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sementara Indeks Kesalehan Sosial dan Indeks Theil masih menunggu release BPS.

Kami sangat berharap kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, khususnya terkait pencapaian kinerja tahun 2019 terhadap target yang belum optimal, dapatnya diberikan saran dan masukan yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan kinerja kami di tahun 2020.

***PIMPINAN DEWAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI,***

***Berikutnya,***

***BAGIAN KEDUA, mengenai Penghargaan Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019***

Kami memahami bahwa penghargaan dari Pemerintah bukanlah merupakan satu-satunya alat ukur pencapaian keberhasilan kinerja seorang Kepala Daerah, karena dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak cukup hanya diukur dengan berbagai penghargaan yang telah diterima. Namun demikian penghargaan dari Pemerintah Pusat yang sifatnya Nasional tersebut dapat menjadi bukti adanya pengakuan yang legal terhadap penilaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah, baik yang mencakup aspek pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat maupun daya saing daerah.

Selama penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima sebanyak 54 (lima puluh empat) jenis penghargaan baik nasional maupun regional atau secara rerata 4,5 penghargaan setiap bulan. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan penghargaan dalam skala nasional, yang

dikelompokkan ke dalam **15 (lima belas) bidang penghargaan**. Selengkapnya kami bacakan sebagai berikut:

#### **A. Penghargaan Bidang Pemerintahan**

- 1) PENGHARGAAN TERBAIK ATAS LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur melalui Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 25 April 2019 di Banyuwangi.
- 2) BKN AWARD 2019**, diberikan atas pengakuan dalam Perencanaan, Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun Tingkat Provinsi. Diberikan di Yogyakarta tanggal 25 September 2019.
- 3) PENGHARGAAN SEBAGAI PROVINSI TERBAIK DALAM PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**, diberikan di Solo pada tanggal 25 September 2019.
- 4) PENGHARGAAN SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN**, diberikan kepada Kepala Daerah karena kebijakannya dinilai berpihak terhadap perubahan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Diberikan oleh Menteri PAN dan RB di Jakarta, tanggal 10 Desember 2019.
- 5) PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK**, diberikan oleh Wakil Presiden RI di Jakarta, tanggal 21 November 2019.

#### **B. Penghargaan Bidang Keuangan**

- 1) OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)**, Apresiasi ini diberikan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tahun Anggaran 2018, dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan RI di Surabaya, pada tanggal 2 Oktober 2019.

**2) PROVINSI TERBAIK DENGAN SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN TERINTEGRASI DENGAN SIGNATURE SECARA ONLINE DAN EVALUASI RAPERDA APBD KAB/KOTA SECARA ELEKTRONIK,**

Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tanggal 5 November 2019.

**C. Penghargaan Bidang Ekonomi**

**1) PERINGKAT II PROVINSI DENGAN TINGKAT PEREKONOMIAN TERBAIK,** diberikan kepada Pemerintah Jawa Timur sebagai Provinsi dengan Tingkat Perekonomian Terbaik, Tingkat Pertumbuhan Fiskal Terbaik, Tingkat Daya Saing Terbaik, dan Tingkat Kondisi Keuangan Terbaik, untuk katagori Provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 1000 Trilyun. Diberikan di Jakarta tanggal 26 Juli 2019

**2) PEMBINA PRODUKTIVITAS PARAMAKARYA 2019,** diberikan atas dukungan dan pembinaan Gubernur terhadap perusahaan UKM asal Jawa Timur yang dinilai berhasil meningkatkan produktivitasnya. Diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden, tanggal 28 November 2019.

**D. Penghargaan Bidang Sosial**

**1) PENGELOLA KESERASIAN SOSIAL TERBAIK NASIONAL,** diberikan kepada Pemerintah Jawa Timur karena dinilai berhasil dalam mengelola keserasian sosial.

- 2) **PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT PEDULI LANJUT USIA**, diberikan kepada Gubernur Jawa Timur karena dinilai memiliki kepedulian terhadap lanjut usia. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Sosial RI di Bandung, tanggal 10 Juli 2019.
- 3) **PENGHARGAAN WUJUDKAN GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM-PKH)**, diberikan oleh Menteri Sosial RI di Makasar, tanggal 27 November 2019.
- 4) **PEMBINA ORGANISASI MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI**, diberikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tanggal 25 November 2019.

#### **E. Penghargaan Bidang Pembangunan**

- 1) **PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT PROVINSI TERBAIK II**, diberikan kepada Jawa Timur karena dinilai berhasil dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, diberikan oleh Presiden RI di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 2019.

#### **F. Penghargaan Bidang Pelayanan Publik**

- 1) **TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK**, Penghargaan ini diberikan atas empat inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil lolos sebagai peserta *United Nations Of Public Service Awards (UNSPA)* Tahun 2019. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), di Semarang tanggal 18 Juli 2019.
- 2) **PROVINSI TERBAIK PROGRAM INOVASI DESA**, diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, tanggal 25 November 2019.

## **G. Penghargaan Bidang Pariwisata**

- 1) **INDONESIA'S ATTRACTIVENESS AWARD (IAA)**, diberikan Pemerintah Jawa Timur karena dinilai mampu berinovasi dalam bidang pengembangan investasi, infrastruktur, pariwisata, dan pelayanan publik katagori AIA Gold Provinsi Besar Terbaik, sehingga berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian daerah. Diberikan di Jakarta tanggal 23 Juli 2019.

## **H. Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan**

- 1) **PENGHARGAAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN**, Provinsi Jawa Timur dinilai berhasil sebagai Pembina Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan Katagori Besar, diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI, pada tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) **GOVERNMENT AWARD 2019 KATAGORI MANAGEMENT KETENAGAKERJAAN**, penghargaan di bidang inovasi pengelolaan pembangunan di daerah, untuk katagori Management Ketenagakerjaan. Diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, tanggal 30 April 2019.

## **I. Penghargaan Bidang Perlindungan Anak**

- 1) **GUBERNUR PENGGERAK PROVINSI LAYAK ANAK**, diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai mampu mengkoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya berkaitan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan pada anak. Diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Makassar, tanggal 23 Juli 2019.

## **J. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**

- 1) PENGHARGAAN PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TERBAIK NASIONAL**, diberikan kepada Pemerintah Jawa Timur karena dinilai telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta, tanggal 4 Oktober 2019.
- 2) PENGHARGAAN KATEGORI PELAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA (GRK) TERBAIK TINGKAT NASIONAL**, Apresiasi di bidang pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Tingkat Nasional. Diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, tanggal 4 Oktober 2019.
- 3) ANUGERAH BAPETEN**, diberikan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai konsisten dan patuh mengikuti prosedur BAPETEN mengenai status keselamatan dan keamanan Nuklir khususnya di bidang kesehatan dan industri. Diberikan oleh Kepala BAPETEN di Jakarta tanggal 24 Juli 2019.

## **K. Penghargaan Bidang Pertanian**

- 1) PERINGKAT I KATEGORI KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH WILAYAH DOMINAN INSEMINASI BUATAN (IB)**, Apresiasi di bidang Peternakan Tingkat Nasional, diberikan oleh Menteri Pertanian RI di Jakarta, tanggal 11 Desember 2019.
- 2) PENGHARGAAN PEMBINA UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB)**, Pemerintah Jawa Timur dinilai berhasil sebagai Pembina Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting Tingkat Provinsi dengan Jumlah

Aseptor Terbanyak se-Indonesia. Diberikan oleh Menteri Pertanian RI di Surabaya, tanggal 10 Oktober 2019.

- 3) **PENGHARGAAN PEMBINA HILIRISASI DAN KEWIRAUSAHAAN BIDANG PERKEBUNAN**, apresiasi di bidang pembinaan dan pemberdayaan para petani perkebunan. Diberikan oleh Menteri Pertanian RI di Malang, tanggal 10 Desember 2019.
- 4) **PERINGKAT I PARAMEDIK VETERINER PETUGAS PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PBK)**, Apresiasi di bidang Peternakan dalam ajang pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan UPSUS SIWAB 2019.
- 5) **PERINGKAT II PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN (IB)**, penghargaan di bidang Peternakan dalam ajang pemberian penghargaan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi (Katagori Petugas Inseminator) dalam Pelaksanaan UPSUS SIWAB 2019.

#### **L. Penghargaan Bidang Perhubungan**

- 1) **WAHANA TATA NUGRAHA WIRATAMA**, diberikan Pemerintah Jawa Timur karena dinilai mampu membangun dan menata transportasi publik dengan baik pada aspek administrasi, teknis, dan operasional. Diberikan oleh Menteri Perhubungan RI di Jakarta, tanggal 15 September 2019.
- 2) **BEST AIRPORT 2019**, diberikan kepada Bandara Abdurrahman Saleh Malang sebagai First Winner dan Best Aiport katagori UPBU Kelas II. Diberikan oleh Menteri Perhubungan RI di Jakarta, tanggal 6 Desember 2019.

#### **M. Penghargaan Bidang Pendidikan**

- 1) **ANEGERAH KIHAJAR 2019**, Penghargaan Katagori Madya Tingkat Provinsi atas Inovasi TIK melalui realisasi E-Administrasi. Diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 14 November 2019.

#### **N. Penghargaan Bidang Hukum dan HAM**

- 1) **PROVINSI TERBAIK TIM TERPADU (TIMDU) TINGKAT NASIONAL**, diberikan Pemerintah Jawa Timur karena dinilai berhasil dalam mengelola dan menangani Konflik Sosial. Diberikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta tanggal 16 Mei 2019.
- 2) **PROVINSI PEMBINA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM**, diberikan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai Pembina Pemerintah Kabupaten/kota yang Peduli HAM. Diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada hari HAM se Dunia di Bandung tanggal 10 Desember 2019.
- 3) **PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM TERBAIK III**, diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, tanggal 10 September 2019.

#### **O. Penghargaan Non-Pemerintah Bersifat Nasional**

- 1) **PENGHARGAAN WANITA SATU DIGIT**, Penghargaan ini kepada Gubernur karena Provinsi Jawa Timur dinilai mampu berkontribusi dalam menurunkan angka Kemiskinan Nasional hingga di bawah 10 persen melalui sejumlah program unggulan. Diberikan oleh Badan Musyawarah Antar-Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (Bamag LKKI) di Batu, tanggal 6 Maret 2019.

- 2) **ANUGERAH PWI JATIM AWARD**, diberikan Gubernur Jawa Timur sebagai Tokoh Nasional yang berjasa dalam bidang Pemberdayaan Perempuan. Diberikan oleh Wakil Ketua PWI Pusat di Surabaya tanggal 27 Maret 2019.
- 3) **PENGHARGAAN REKOR MURI MUDIK GRATIS TERBANYAK**, diberikan kepada Pemerintah Jawa Timur karena kebijakan Mudik Gratis pada saat Hari Raya dengan jumlah total penumpang kurang lebih 270 ribu orang yang menggunakan berbagai moda transportasi. Diberikan oleh Eksekutif Manajer MURI tanggal 1 Juni 2019.
- 4) **PENGHARGAAN SANG PEMIMPIN KATEGORI PELAYANAN PUBLIK**, diberikan oleh CEO Okezone di Jakarta, tanggal 18 Oktober 2019.
- 5) **PENGHARGAAN GUBERNUR PEDULI PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH**, diberikan oleh DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) di Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 2019.
- 6) **PENGHARGAAN PEDULI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR**, diberikan oleh Pengurus PGRI Pusat, tanggal 24 November 2019 di Surabaya.
- 7) **PIN EMAS DARI KAPOLRI**, sebagai inisiator berdirinya SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi, diberikan oleh Kapolda atas nama Kapolri tanggal 10 Juli 2019.

## **8) TOKOH PEREMPUAN JAWA TIMUR**

Penghargaan ini diberikan CEO Majalah Times Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu tokoh perempuan berpengaruh di Jawa Timur.

Penghargaan yang diperoleh selama tahun 2019 ini, merupakan keberhasilan kita semua, dan tentu juga atas dukungan dari semua pihak terutama dukungan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

**HADIRIN, PESERTA SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,**

Demikian beberapa hal penting mengenai laporan pertanggungjawaban tahun 2019 yang dapat kami sampaikan melalui Nota Penjelasan pada hari ini. Sebagai manusia biasa tentunya kami mengakui masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini iijinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat apabila dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun 2019 terdapat kekurangan dan kesalahan, baik pada narasi substansi materi, data-data pendukung maupun kesalahan yang sifatnya redaksional. Pasca sidang paripurna hari ini kami berharap adanya pencermatan, masukan dan saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif sebagai bentuk *Checks and Balances* DPRD kepada Kepala Daerah yang mencerminkan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memang telah berjalan harmonis, ber-seiring dan sejalan dalam proses pembangunan daerah, serta dalam mengatasi berbagai persoalan krusial masyarakat Jawa Timur secara menyeluruh.

Seluruh pencermatan, masukan, saran maupun kritik yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Kami menyadari bahwa *Checks and Balances* yang dilakukan oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat dapat menjadi dorongan semangat yang kuat sekaligus sebagai bekal kami untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan secara signifikan dan lebih berkualitas.

Kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh Jajaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih atas kehadiran Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat yang telah memenuhi quorum, dengan harapan sidang paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 dapat dilanjutkan ke Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi hingga ke akhir Sidang Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur mengenai Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

***Akhirul Kalam, Billaahi Taufiq Wal Hidayah,***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**